JURNAL ILMU EKONOMI (JIE)
Vol. 3 No. 3, Desember 2024
https://risetekonomi.com/jurnal/index.php/jie
E-ISSN : 2985-4652

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA

Fatimah[1], Puti Andiny[2], Yani Rizal[3], Safuridar[4]

[1] Universitas Samudra, Kota Langsa, Aceh, Indonesia
[2] Universitas Samudra, Kota Langsa, Aceh, Indonesia
[3] Universitas Samudra, Kota Langsa, Aceh, Indonesia
[4] Universitas Samudra, Kota Langsa, Aceh, Indonesia

ABSTRACT

This study looks at how local produced income (PAD) and government spending affect North Sumatra's economic growth between 2014 and 2023. The multiple linear regression approach was used, along with t-tests to determine each variable's partial influence and F-tests to determine their combined effects. With a coefficient of 2.83, the results show that government spending has a positive but negligible impact on economic growth. On the other hand, with a value of -2.08, PAD has a notable adverse effect on economic growth. An R-squared value of 65.90% indicates that government spending and PAD together have a strong impact on economic growth. These findings emphasise how crucial it is to maximise public investment and improve PAD management's efficacy in order to promote more equitable and sustainable economic growth in North Sumatra.

Keywords: Government Spending, Local Revenue (PAD), Economic Growth

ABSTRAK

Penelitian ini melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Sumut pada tahun 2014 hingga 2023. Pendekatan yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel dan uji F untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel. efek gabungan. Dengan koefisien sebesar 2,83, hasilnya menunjukkan bahwa belanja pemerintah mempunyai dampak positif namun dapat diabaikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, dengan nilai -2,08, PAD mempunyai dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai R-squared sebesar 65,90% menunjukkan bahwa belanja pemerintah dan PAD secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan-temuan ini menekankan betapa pentingnya memaksimalkan investasi publik dan meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di Sumatera Utara.

Kata kunci: Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi

RIWAYAT ARTIKEL
Tersedia *Online*: 30-12-2024

KORESPONDENSI:
Nama : Fatimah
E-mail: ff3125928@gmail.com

DOI:
https://doi.org/10.59827/jie.v3i3.164
PENERBIT:
Laboratorium Riset Ekonomi

PENDAHULUAN

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk kesehatan fisik dan mental, merupakan tujuan pembangunan. Idealnya, semua lapisan masyarakat mendapat manfaat yang sama dan adil dari kemajuan. Karena hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi namun juga membawa perubahan struktural yang besar, maka pembangunan ekonomi sangatlah penting dalam proses ini. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mempunyai keterkaitan yang saling memperkuat dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat merangsang pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ekspansi ekonomi yang pesat diharapkan mampu meningkatkan lapangan kerja yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Priambodo, 2014).

Melalui berbagai inisiatif strategis, pemerintah memainkan peran penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang ini. Kebijakan fiskal, atau pengendalian pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai pembangunan ekonomi yang stabil dan keseimbangan ekonomi secara keseluruhan, merupakan salah satu alat utama yang digunakan. Faktor-faktor penting termasuk permintaan agregat, tingkat aktivitas ekonomi, distribusi sumber daya, dan pendapatan publik semuanya mungkin terkena dampak oleh perubahan dalam pengelolaan anggaran, baik yang berasal dari pajak maupun pengeluaran pemerintah (Tuwo et al., 2021).

Sebagai negara penyumbang PDB (produk domestik regional bruto) terbesar kedua setelah Pulau Jawa, Pulau Sumatera mempunyai posisi penting dalam perekonomian Indonesia. Tahun demi tahun perekonomian wilayah Sumatera terus meningkat. Sumatera Utara yang terkenal dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, merupakan salah satu provinsi di Sumatera yang memiliki potensi paling besar. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Sumatera Utara harus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang menimbulkan kesulitan (Tuwo et al., 2021).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan harus berkeadilan dan merata. Selain mendorong ekspansi ekonomi, pembangunan ekonomi juga membawa penyesuaian struktural yang mempunyai pengaruh signifikan. Pulau Sumatera, khususnya Sumatera Utara, memiliki kepentingan strategis bagi perekonomian Indonesia. Namun, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan, permasalahan seperti pengelolaan keuangan daerah yang tidak memadai harus segera diselesaikan. Agar seluruh daerah benar-benar mendapatkan manfaat pertumbuhan secara adil, pemerintah harus terus memperkuat kebijakan fiskal dan memaksimalkan potensi daerah.

Tabel 1

Data laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara

Tahun	Pengeluaran Pemerintah	Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan Ekonomi
2014	7,808,557,310	4,416,811,865	419.573,31
2015	7,959,167,184	4,883,880,619	440.955,85
2016	9,809,035,453	4,954,833,101	463.775,46
2017	12,561,047,885	5,287,469,402	487.531,23
2018	12,563,387,550	5,287,469,402	512.762,63
2019	13,724,168,459	5,761,270,412	539.513,85
2020	12,753,607,434	7,583,849,755	533.746,36
2021	13,435,893,167	5,991,151,366	547.651,82
2022	12,615,745,596	6,819,012,313	573.528,77
2023	14,375,662,997	9,776,606.2549	602.235,95

Sumber BPS Sumatera Utara 2023.

Tabel 1 menampilkan variasi statistik pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dari tahun 2014 hingga 2023, yang menunjukkan karakteristik perekonomian daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi antara tahun 2014 dan 2019 sebagian besar stabil, berkisar antara 5,10 dan 5,23%, dibantu oleh kemajuan di sektor perdagangan, pengolahan, dan pertanian. Namun dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada beberapa sektor perekonomian menyebabkan penurunan signifikan sebesar -1,07% pada tahun 2020. Pertumbuhan mencapai 2,61% pada tahun 2021, menandakan dimulainya pemulihan. Pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing naik menjadi 4,73% dan 5,01%. Kebangkitan aktivitas di sektor-sektor primer dan meningkatnya kontribusi industri pariwisata menjadi katalis bagi pemulihan ini. Kebijakan pemerintah yang mengelola sumber daya, meningkatkan iklim investasi, dan meningkatkan layanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat penting bagi keberlanjutan ekspansi ini (Kamba et al., 2021).

Pada tahun 2014 hingga tahun 2023, belanja pemerintah Sumut mengalami peningkatan sesuai dengan angka pada Tabel 1. Belanja pemerintah dimulai sebesar Rp7.808.557.310 pada tahun 2014, naik menjadi Rp7.959.167.184 pada tahun 2015, kemudian meningkat tajam menjadi Rp9.809.035.453 pada tahun 2016. efek dari selama pandemi, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 12,753,607,434 setelah terus meningkat hingga mencapai Rp 13,724,168,459 pada tahun 2019. Meskipun sedikit menurun menjadi Rp 12,615,745,596 pada tahun 2022, belanja kembali meningkat menjadi Rp 13,435,893,167 pada tahun 2021. Belanja akan naik kembali menjadi Rp 14.375.662.997 pada tahun 2023. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, dan pemulihan ekonomi guna mendorong pembangunan berkelanjutan di daerah tercermin dalam pertumbuhan ini.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara dari 2014 hingga 2023 juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dimulai dari Rp4.416.811.865 pada tahun 2014, PAD terus meningkat hingga mencapai Rp4.883.880.619 pada 2015 dan Rp4.954.833.101 pada 2016. Pada 2017, PAD melonjak menjadi Rp5.287.469.402, angka yang sama juga dicatat pada tahun 2018, sebelum kembali meningkat menjadi Rp5.761.270.412 pada 2019. Meskipun pandemi COVID-19 menekan PAD menjadi Rp5.991.151.366 pada tahun 2020, pemulihan terjadi pada 2021 dengan PAD mencapai Rp6.819.012.313 dan melonjak pesat menjadi Rp9.776.606.254 pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya, memaksimalkan pendapatan pajak, serta retribusi daerah untuk mendukung belanja publik dan investasi infrastruktur demi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Ada sejumlah permasalahan yang perlu dipertimbangkan, meskipun data menunjukkan adanya tren peningkatan yang signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja pemerintah di Sumatera Utara. Kapasitas pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana untuk inisiatif pembangunan secara efektif mungkin terhambat oleh ketidakstabilan dalam penerapan PAD. Selain itu, hubungan antara belanja pemerintah dan pembangunan ekonomi tidak selalu stabil, terutama jika menyangkut belanja modal. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas pengelolaan anggaran untuk memastikan bahwa pengeluaran benar-benar berkontribusi pada peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan perencanaan yang lebih strategis dan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat

memaksimalkan potensi ekonomi Sumatera Utara untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Memahami bagaimana pertumbuhan ekonomi Sumut dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kebijakan pemerintah

KAJIAN TEORITIS

a. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno (dalam Mamuane et al., 2021) adalah peningkatan aktivitas ekonomi yang meningkatkan output produk dan jasa, yang pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ini menunjukkan seberapa besar aktivitas ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, ketika pendapatan riil masyarakat pada suatu tahun melebihi pendapatan riil pada tahun sebelumnya, maka terjadilah pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi, salah satu ukuran utama pembangunan, sangat penting dalam menunjukkan seberapa baik suatu daerah atau negara telah berkembang. Peningkatan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan produk dan jasa selama periode waktu tertentu biasanya dinilai setiap tahun disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan investasi, selain peningkatan produksi ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kemajuan yang penting karena menunjukkan seberapa baik investasi publik dan kebijakan pemerintah telah merangsang kegiatan perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota dan Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat

nasional merupakan metrik yang sering digunakan untuk mengukur peningkatan tersebut. Saat membandingkan kinerja perekonomian antar wilayah atau periode waktu, persentase pertumbuhan PDB, sering disebut sebagai tingkat pertumbuhan PDB, digunakan untuk menggambarkan laju pembangunan ekonomi dalam periode waktu tertentu.

Anitasari & Soleh (2015) menegaskan bahwa pemerataan keuntungan pertumbuhan ekonomi sama pentingnya dengan keberhasilan pembangunan suatu daerah seperti halnya tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pembangunan dipandang tidak berhasil secara keseluruhan jika pertumbuhan ekonomi kuat namun tidak semua lapisan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan harus fokus pada peningkatan pemerataan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi:

1. Investasi: Salah satu kekuatan utama di balik ekspansi ekonomi adalah investasi pemerintah, baik pada proyek infrastruktur maupun modal. Industri strategis bisa menjadi lebih produktif dengan investasi yang tepat sasaran.
2. Tenaga Kerja Produktivitas perekonomian suatu daerah sangat dipengaruhi oleh tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD): Inisiatif pembangunan yang mendorong perluasan ekonomi dapat dibiayai dengan menggunakan uang yang diterima daerah dari pajak, retribusi, dan pengelolaan aset.
4. Infrastruktur: Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas publik, mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, distribusi barang, dan mobilitas tenaga kerja.
5. Kebijakan Pemerintah: Kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi memberikan stabilitas dan kepercayaan bagi pelaku usaha.

   Tantangan dalam Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan:

   - Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah: Pertumbuhan ekonomi sering kali terkonsentrasi di wilayah tertentu, seperti kawasan perkotaan, sehingga daerah pedesaan atau terpencil tertinggal.
   - Ketergantungan pada Sumber Daya Alam: Wilayah yang bergantung pada sektor primer sering kali menghadapi tantangan dalam diversifikasi ekonomi.

- Efisiensi Penggunaan Dana Publik: Pengelolaan belanja modal dan PAD yang kurang optimal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi adalah elemen vital dalam pembangunan yang tidak hanya mengukur keberhasilan dari sisi angka, tetapi juga dari kemampuan menciptakan pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis data sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi bukan hanya cerminan peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga tolok ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Dengan mengandalkan penghitungan PDB dan PDRB berbasis harga konstan, pemerintah dan pemangku kebijakan dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kinerja ekonomi suatu daerah. Namun, untuk memastikan pertumbuhan ini berkelanjutan, fokus harus diarahkan pada peningkatan kualitas produksi, optimalisasi sumber daya, dan pemerataan hasil pembangunan. Pendekatan ini akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat pada angka, tetapi juga berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

b. Pengeluaran pemerintah

Ada dua perspektif utama mengenai pengeluaran pemerintah: teori makroekonomi dan teori mikroekonomi. Mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dan pembangunan ekonomi atau pendapatan nasional, ada dua aliran pemikiran dalam teori makroekonomi. Dalam kondisi makroekonomi, pengeluaran pemerintah sering kali dibagi menjadi tiga kategori utama: transfer, pembayaran gaji pegawai, dan pembelian komoditas dan jasa.

Menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi penawaran dan permintaan barang publik adalah tujuan utama pendekatan makroekonomi terhadap pengeluaran pemerintah. Faktor utama yang mempengaruhi kuantitas barang publik yang dapat dipasok melalui alokasi anggaran pemerintah adalah hubungan antara penawaran dan permintaan (Lubis et al., 2024).

Menurut teori makroekonomi dan mikroekonomi, pengeluaran pemerintah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama dari sudut pandang makroekonomi adalah untuk memahami bagaimana dinamika penawaran dan

permintaan barang publik berdampak pada alokasi anggaran. Pemerintah dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan barang publik dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi melalui pengelolaan pengeluaran yang efisien. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan keuntungan belanja pemerintah, diperlukan langkah-langkah penganggaran yang efektif dan cerdas.

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk membeli aset tetap atau aset lain yang menghasilkan manfaat ekonomi dalam beberapa periode akuntansi, sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2. Ini mencakup biaya pembelian atau pembuatan aset termasuk bangunan, jalan, mesin. , dan infrastruktur lainnya. Empat kategori utama yang termasuk dalam PAD adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah
2. Pajak Daerah
3. Hasil Administrasi Kekayaan Daerah yang Berbeda
4. Pendapatan Tambahan Pendapatan yang tidak dikenakan pajak daerah termasuk dalam kategori ini.

Salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, yang memainkan peran penting dalam membiayai inisiatif pembangunan, adalah PAD. Sumber ini memungkinkan daerah untuk lebih mandiri secara finansial dalam mendukung program-program pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Namun, penting untuk memastikan bahwa PAD dikelola secara efisien dan diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung pada masyarakat.

Di sisi lain, belanja modal merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan jangka panjang. Pengeluaran ini difokuskan untuk investasi yang dapat meningkatkan produktivitas daerah, seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. Belanja modal mempunyai dampak jangka panjang terhadap perluasan perekonomian daerah.

Agar pembangunan daerah berkelanjutan dapat didukung, pengelolaan PAD dan belanja modal harus dilakukan secara efisien. Pembangunan yang produktif dapat dibiayai oleh PAD dengan perencanaan dan pengawasan yang tepat. Namun belanja modal harus diarahkan pada inisiatif strategis jangka panjang yang mendorong

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keduanya dapat menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan standar pelayanan publik jika dikelola dengan baik.

d. Penelitian Terdahulu

1. Hutagalung & Muharam: Studi ini menunjukkan bahwa, antara tahun 2013 dan 2017, belanja modal dan PAD tidak memiliki dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi Sumatera Utara. Setiap skor signifikan di atas 0,05 menunjukkan bahwa untuk memberikan kontribusi yang lebih efektif terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja modal dan pengelolaan PAD harus diperkuat.
2. Priambodo (2014): Tenaga kerja dan PAD terbukti berpengaruh baik terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, namun belanja modal berpengaruh negatif. Guna menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penelitian ini merekomendasikan pengelolaan PAD yang lebih baik, penggunaan belanja modal yang lebih efektif untuk pembangunan infrastruktur, dan pengembangan keterampilan pekerja melalui pelatihan.
3. Anitasari & Soleh (2015): Studi yang dilakukan di Provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi; peningkatan belanja sebesar 1 miliar rupiah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1,17% setiap tahunnya. Untuk mendorong kegiatan perekonomian secara maksimal, investasi pemerintah harus diarahkan pada taktik yang lebih efektif, terutama pada wilayah-wilayah yang merupakan hasil pertumbuhan, karena dampaknya tidak merata di seluruh wilayah.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup penelitian

Studi ini mengkaji dampak pendapatan asli daerah (PAD) dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi dalam rentang waktu 2014–2023. Untuk melengkapi proses penelitian, data sekunder dari Badan Pusat Statistik diolah dan dianalisis sebagai bagian dari metodologi kuantitatif.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Linear Berganda

   Regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini, dan uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan uji t digunakan untuk mengukur pengaruh parsial variabel independen. Berikut rumusan model regresi linier berganda populasi:

   $Y = \beta 0 + \beta 1X1 + \beta 2X2 + e$

   Kemudian ditransformasikan sehingga mudah untuk diinterpretasikan menjadi:

   $PE = \beta 0 + \beta 1PP + \beta 2PAD + e$

   Keterangan

   PE : petumbuhan ekonomi

   β0 :bilangan konstan

   β1 ,β2 = koefisien regresi

   PP : Pengeluaran Pemerintah

   PAD: Pendapatan Asli Daerah

   e : standar error

2. Asumsi Klasik

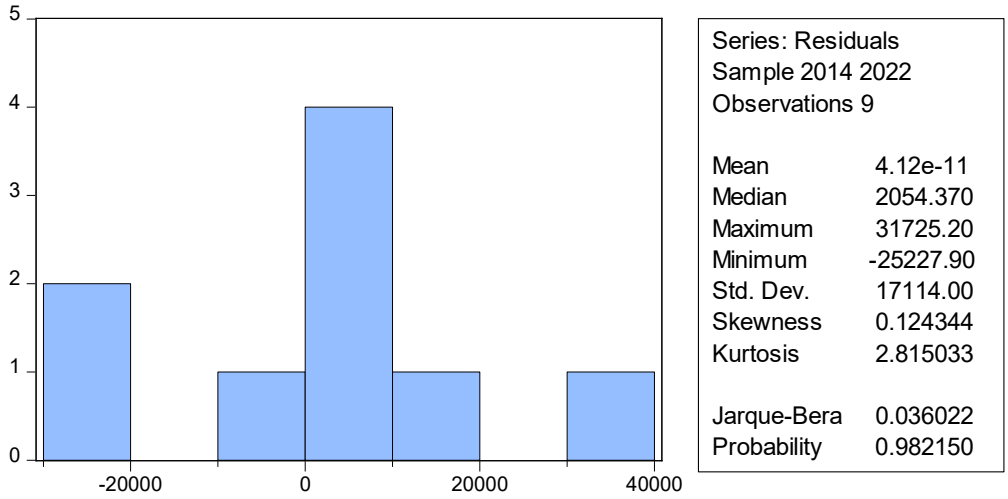
   Uji Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Asumsi Klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asumsi klasik

Verifikasi melalui pengujian asumsi tradisional diperlukan untuk memastikan bahwa hasil analisis regresi dapat diandalkan dan bebas dari bias. Untuk menjamin validitas dan keandalan temuan estimasi, pengujian ini dilakukan untuk memastikan model dan data yang digunakan memenuhi persyaratan asumsi klasik. Pengujian ini mencari kemungkinan pelanggaran yang dapat mengganggu keakuratan estimasi, seperti heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Hasil pengujian asumsi tradisional yang dilakukan adalah sebagai berikut.

a) Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber : Eviews 10 (data diolah)

Sesuai gambar di atas. diperoleh jaque-bera sebesar 0.036022 dengan probabilitas 0.982150 > 0.05, hal ini menunjukkan bahwa data penelitian tersebut tipikal.

b) Uji multikoleniaritasTabel

Variance Inflation Factors
Date: 11/14/24 Time: 14:40
Sample: 2014 2023
Included observations: 9

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.72E+09	39.74892	NA
PP	1.62E-11	51.02911	1.779514
PAD	8.59E-11	65.33821	1.779514

Sumber : eviews 10 (data diolah)

Tabel 2 menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja pemerintah karena VIF kurang dari 10.

c) Uji heterokedatisitas

Tabel 3. Uji heterokedatisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	3.556350	Prob. F(2,6)	0.0958
Obs*R-squared	4.881855	Prob. Chi-Square(2)	0.0871
Scaled explained SS	1.969050	Prob. Chi-Square(2)	0.3736

Sumber : eviews 10 (data diolah)

Tabel 3 menunjukkan bahwa Chi-Square Prob: 0.0871 > 0.05, menunjukkan bahwa penelitian ini tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

d). Uji autokolerasi

Tabel 4. Uji autokolerasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	6.509761	Prob. F(2,4)	0.0552
Obs*R-squared	6.884782	Prob. Chi-Square(2)	0.0320

Sumber : eviews 10 (data diolah)

Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi dalam penyelidikan ini, dengan kuadrat Prob.chi sebesar 0,0320 < 0,05.

Regresi linier berganda

Tabel 5. Analisis Linear Berganda

Dependent Variable: PERTUMBUHAN_EKONOMI
Method: Least Squares
Date: 11/14/24 Time: 14:38
Sample (adjusted): 2014 2022
Included observations: 9 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	221353.1	41530.04	5.329952	0.0018
PP	1.47E-05	4.03E-06	3.646943	0.0107
PAD	1.98E-05	9.27E-06	2.136000	0.0766

R-squared	0.893117	Mean dependent var	502115.5
Adjusted R-squared	0.857490	S.D. dependent var	52347.75
S.E. of regression	19761.55	Akaike info criterion	22.88207
Sum squared resid	2.34E+09	Schwarz criterion	22.94781
Log likelihood	-99.96929	Hannan-Quinn criter.	22.74020
F-statistic	25.06817	Durbin-Watson stat	1.616669
Prob(F-statistic)	0.001221		

Sumber : eviews 10 (data diolah)

Analisis Persamaan Regresi :

$$PE = 221353.1 + 1.47E\text{-}05X_1 + 1.98E\text{-}05X_2$$

1. Jumlah tetap sebesar 221.353. Meskipun faktor-faktor lain tetap konstan, skor 1 menunjukkan bahwa tindakan pemerintah mempunyai dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Koefisien regresi variabel pengeluaran pemerintah sebesar 1.47E-05, artinya setiap kenaikan belanja pemerintah sebesar 1% maka pertumbuhan ekonomi akan terstimulasi sebesar 1.47E-05.
3. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai koefisien regresi sebesar 1,98E-05, artinya kenaikan PAD sebesar 1% akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,98E-05.

Analisis Hasil Uji F (Simultan)

Hasil uji F yang bernilai 0,001221 (< 0,05) menunjukkan bahwa baik Belanja Pemerintah maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumut. Oleh karena itu, hipotesis ketiga, yang menyatakan bahwa gabungan keduanya mempunyai dampak yang besar, diterima.

Uji R^2

Total kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen adalah sebesar 89,31%, sesuai dengan nilai R-Squared sebesar 0,893117. Sisanya sebesar 10,69% dipengaruhi oleh variabel tambahan yang tidak termasuk dalam lingkup penelitian ini.

PEMBAHASAN

Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan temuan estimasi Tabel 5, koefisien variabel pengeluaran pemerintah sebesar 1,47E-05 memiliki nilai probabilitas signifikan sebesar 0,0107. Mengingat nilai probabilitas tersebut kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumut. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,47E-05

persen akan dihasilkan dari setiap kenaikan belanja pemerintah sebesar 1%. Namun, jika seluruh parameter lainnya tetap sama atau tetap (ceteris paribus), maka kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% juga diperkirakan akan mengakibatkan peningkatan belanja pemerintah sebesar 1,47E-05 persen dalam satu tahun.

Dampak penting ini menunjukkan betapa belanja pemerintah merupakan faktor kunci dalam meningkatkan perekonomian Sumatera Utara. Pembangunan ekonomi dipengaruhi langsung oleh belanja pemerintah, yang meliputi belanja modal di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan bidang produktif lainnya. Misalnya, belanja pemerintah untuk infrastruktur dapat meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas logistik, yang pada gilirannya mendorong kegiatan ekonomi yang lebih luas di berbagai industri.

Besaran kontribusi yang sangat rendah (1,47E-05 persen) menunjukkan bahwa meskipun berpengaruh, belanja pemerintah masih mempunyai dampak makroekonomi yang terbatas. Penyebab berikut mungkin menjadi penyebabnya:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran: Tidak semua belanja pemerintah diarahkan pada sektor yang memberikan dampak maksimal terhadap perekonomian.
2. Kapasitas Implementasi Program: Hambatan administratif atau teknis dalam merealisasikan program-program pemerintah dapat mengurangi efektivitas pengeluaran.
3. Keterbatasan Infrastruktur yang Ada: Pengeluaran pemerintah memerlukan sinergi dengan investasi swasta untuk menciptakan dampak yang lebih besar.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan alat utama untuk mendorong ekspansi ekonomi di Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi di masa depan mungkin akan terdorong oleh peningkatan investasi pemerintah yang terfokus, khususnya di bidang-bidang produktif seperti infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai koefisien determinasi sebesar 1.98E-05 dengan tingkat probabilitas sebesar 0.0766 sesuai temuan estimasi pada Tabel 5. Dapat disimpulkan bahwa PAD tidak mempunyai dampak signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah di Sumut. pertumbuhan ekonomi karena nilai probabilitasnya lebih tinggi dari batas 0,05. Jika dinyatakan sebaliknya, kenaikan PAD

sebesar 1% hanya akan memberikan kontribusi sebesar 1,98E-05 persen terhadap pertumbuhan PDB. Sebaliknya, peningkatan pembangunan ekonomi sebesar 1% diperkirakan akan mengakibatkan penurunan PAD di wilayah Sumatera Utara sebesar 1,98E-05 persen hanya dalam waktu satu tahun. Berdasarkan temuan-temuan ini, hipotesis kedua perlu ditolak, yang menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PAD berperan penting dalam menghasilkan pendapatan daerah, namun potensinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terealisasi.

Kesenjangan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan Hutagalung dan Muharam, Laodini et al. (2023), Vivi Oktavia dan Dewi Zulvia (2023), serta Jefri Alfin Sinaga dkk. (2020). Temuan studi mereka juga menunjukkan bahwa PAD sering kali tidak mempunyai dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Sumber utama fenomena ini adalah ketidakseimbangan antara pendapatan PAD dengan pemanfaatan optimalnya untuk mendanai pelayanan publik. Misalnya saja, tidak seluruh dana yang diperoleh dari PAD digunakan untuk investasi konstruktif atau inisiatif pembangunan yang meningkatkan standar pelayanan publik dan infrastruktur. Oleh karena itu, produk dan layanan pemerintah daerah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan ekonomi, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi statis atau di bawah standar.

Selain itu, rendahnya kualitas perencanaan dan pengelolaan PAD di tingkat daerah juga dapat menjadi faktor penghambat. Jika pemerintah daerah gagal mengelola PAD secara efektif, hasilnya tidak akan memberikan dampak yang berarti pada penguatan ekonomi lokal. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakefektifan pemanfaatan PAD akan berdampak langsung pada rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kesimpulannya, untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu memperbaiki strategi pengelolaan pendapatan asli daerah. Upaya ini meliputi optimalisasi sumber pendapatan, peningkatan efisiensi alokasi anggaran, dan investasi dalam sektor-sektor yang memiliki dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Tanpa langkah-langkah ini, PAD akan terus menjadi variabel yang kurang relevan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Meski dampaknya masih relatif kecil, setiap peningkatan belanja pemerintah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menggunakan dana secara strategis untuk membantu sektor-sektor penghasil yang signifikan secara ekonomi.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Sumut tidak terlalu terpengaruh oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kurangnya korelasi ini menunjukkan bahwa dana PAD belum dikelola dengan baik untuk mendorong ekspansi ekonomi. Salah satu faktor utamanya adalah disparitas penerimaan PAD dengan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pelayanan publik. Hal ini mengurangi kemampuan PAD untuk meningkatkan tingkat produksi produk dan jasa serta ekspansi ekonomi secara umum.

B. Saran

Pemerintah daerah Sumatera Utara harus memaksimalkan pengeluaran dengan berkonsentrasi pada inisiatif seperti pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas pelayanan publik juga penting. Selain itu, peningkatan kolaborasi antara pemerintah dan sektor ekonomi serta diversifikasi sumber PAD dapat menarik investasi tambahan. Pemantauan rutin terhadap inisiatif pembangunan dan pengambilan keputusan berdasarkan data akan menjamin efektivitas kebijakan. Meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat luas juga memerlukan investasi dalam pendidikan sumber daya manusia dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Selain itu saran ini juga dapat di optimasikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengeluaran Pemerintah:

   Pemerintah daerah perlu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam alokasi pengeluaran, khususnya untuk sektor-sektor yang memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Langkah ini dapat mempercepat proses pembangunan dan memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan.

2. Peningkatan Pengelolaan PAD:

   Pemerintah daerah harus mengembangkan strategi untuk meningkatkan potensi PAD, termasuk penggalian sumber-sumber baru dan perbaikan sistem administrasi pajak dan retribusi. Selain itu, PAD yang diterima harus diarahkan untuk program-program pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

3. Penguatan Layanan Publik:

   Untuk memaksimalkan dampak PAD, pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini meliputi investasi pada sektor produktif dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, seperti pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi lokal.

4. Kolaborasi dengan Stakeholder:

   Pemerintah perlu melibatkan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi. Kolaborasi ini dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

5. Pemantauan dan Evaluasi:

   Penting bagi pemerintah daerah untuk secara rutin mengevaluasi kebijakan pengeluaran dan penggunaan PAD. Dengan pemantauan yang baik, permasalahan dapat diidentifikasi lebih awal, dan kebijakan dapat disesuaikan untuk mencapai hasil yang optimal.

REFERENSI

Anitasari, M., & Soleh, A. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *3*(2). Https://Doi.Org/10.37676/Ekombis.V3i2.139

Dumais, J. K., Rotinsulu, D. C., & Sumual, J. I. (2022). *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa Utara*. *22*.

Hutagalung, D. K., & Muharam, A. (n.d.). *Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Tahun 2013-2017*.

Izzah, N. (2017). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Tahun 1995—2014. *At-tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, *3*(1), 56. https://doi.org/10.24952/tijaroh.v3i1.758

Jefri Alfin Sinaga, Elidawaty Purba, & Pawer Darasa Panjaitan. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun: The Effect of Local Own Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Special Allocation Fund (DAK) on Economic Growth in Simalungun Regency. *Jurnal Ekuilnomi*, *2*(1), 40–48. https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.350

Kamba, B., Koleangan, R. A. M., & Tumilaar, R. L. H. (2021). *The Effect Of Private Investment, Government Expenditure, Labor Force And Regional Original Income On Economic Growth In North Sulawesi Province*.

Laodini, A., Rorong, I. P. F., & Tumangkeng, S. Y. L. (2023). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara Periode 2010 – 202*. *23*(6).

Lubis, C. K. S., Sari, C. M., Syahfitri, T. I., & Suharianto, J. (2024). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Utara Tahun 2019-2022*. *3*(1).

Mamuane, N., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara*. *21*(02).

Nasution, N. A., Si, M., Panggabean, F. Y., & Si, M. (2017). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. *8*.

Pratama, M. R. A., Khalis, S. A., Rizky, M., & Nasution, S. (2012). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pengeluaran DaerahTerhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2012—2022*.

Priambodo, A. (2014). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012*.

Tuwo, R. D., Rotinsulu, D. C., & Kawung, G. M. V. (2021). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasa*. *21*(04).

Vivi Oktavia & Dewi Zulvia. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *2*(2), 266–282. https://doi.org/10.58192/profit.v2i2.750